

MENYIKAPI BUDAYA KEKERASAN

Oleh Zaenul Mahmudi

Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur seakan menjadi saksi bisu atas terpenggangnya empat sekawanan pencopet. Kisah ini bermula dari tertangkap tangannya seorang pencopet yang sengaja menjarah mangsanya, "copeeeet" teriak korban yang kedapatan tasnya dijarah, kontan saja semua mata dari beratus orang tertuju kepada sumber suara. Massa yang telah lama memendam rasa benci dan dendam yang mendalam atas praktek pencopetan yang pada akhir-akhir ini sangat merajalela, terutama di Terminal Kampung Rambutan seakan mendapatkan "roti" untuk melampiaskan dendamnya, bak api (dendam) yang disiram dengan bensin. Dari sumber suara tersebut massa melihat seseorang yang diikuti tiga orang temannya lari tunggang langgang ke sebuah Metromini, massa langsung menyimpulkan bahwa merekalah pencopetnya, massa langsung mengejar ke arah Metromini tersebut, "bakar itu Metromini" teriak salah seorang massa. "Jangan, kita paksa turun mereka". Akhirnya komplotan pencopet dipaksa turun dan dibakarlah mereka hidup-hidup. Oh... *Astagfirullah wa Inna Lillahi wa Inna Ilaibi Raji'un*.

Ini adalah salah satu contoh fenomena kekerasan yang dilakukan massa, masih banyak lagi kekerasan yang melanda seperti di Maluku, kekerasan dengan mengatasnamakan agama, pembantaian massa atas nama pembangunan seperti di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah, Kasus Nipah di Madura dan lain sebagainya; dan pembantaian atas nama ketertiban, seperti perebutan Kantor Pimpinan Pusat PDI Jakarta pada tahun 1996 yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli, semua bentuk kekerasan ini memakan korban yang cukup banyak, dan masih menyisakan kesedihan yang mendalam bagi para ahli waris dan keluarga korban. Sudah

sebegitukah kejam dikau wahai Bangsaku ? melegalkan pembantaian rakyat atas nama yang terlalu mulya untuk digunakan, meletakkan sesuatu dengan cara yang terbalik, Orang Barat sana bilang "Put the cart before the horse" (AS Hornby, 1986 : 124).

Tinjauan Definisi

Demi memperoleh gambaran yang lebih jelas atau agar kita terhindar dari kekaburan masalah, saya akan mencermati *keywordnya*, yaitu kata budaya dan kekerasan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta "*buddhayab*", suatu bentuk jamak dari kata "*buddhi*" yang berarti budi atau akal, sehingga kebudayaan bisa diartikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Sedangkan istilah "*culture*" yang searti dengan kebudayaan berasal dari bahasa Latin "*colere*" yang berarti mengolah atau mengerjakan, sehingga kebudayaan (*culture*) bisa diartikan dengan segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Koentjaraningrat, 1965 : 77-78).

Sedangkan menurut salah seorang Antropolog, E.B. Taylor yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto (1974 : 40) "Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. Dan masih banyak lagi definisi-definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh para pakar di bidangnya yang tidak disebutkan disini, namun dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa unsur-unsur kebudayaan meliputi :

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia
2. Kebudayaan telah lahir terlebih dahulu sebelum suatu generasi tertentu lahir dan tidak akan sirna

dengan matinya generasi tersebut

3. Kebudayaan diperlukan manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya
4. Kebudayaan berisi aturan-aturan yang meliputi kewajiban-kewajiban dan tindakan-tindakan, baik yang diterima maupun yang ditolak atau yang dilarang maupun yang diizinkan (Soekanto, 1974:48).

Sedangkan "kekerasan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996 : 485) disebutkan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sehingga secara gampang budaya kekerasan dapat diartikan sebagai suatu cara atau kebiasaan yang sudah lama ada dan akan tetap ada, dilakukan secara sadar dan melalui pertimbangan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam usahanya untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

Mencermati definisi-definisi diatas, kemudian yang mengsik adalah pertanyaan apakah kekerasan sudah menjadi diskursus yang termasuk dalam kategori budaya Bangsa Indonesia, ini perlu dicermati karena bisa menjadi pukulan telak yang teramat menyakitkan bagi Bangsa Indonesia yang sudah terkenal memiliki adat ketimuran yang terkenal penduduknya selalu mengedepankan ketinggian etika, keramah-tamahan, kesopanan dan saling menghormati dalam pergaulan humanisnya dengan sesama manusia tanpa memperhatikan kebangsaan, agama dan *bloodshipnya*.

Wacana Kekerasan di Indonesia

Kalau kita mencermati wacana kekerasan yang terjadi di Indonesia, tampaknya sudah terjadi semenjak nenek moyang kita ada, bagaimana cerita-cerita yang bisa kita dapati dalam literatur-literatur sejarah seperti perebutan kekuasaan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia, bagaimana daya upaya dan siasat licik yang dilakukan Ken Arok untuk merebut kekuasaan dari Kerajaan Tumapel yang dipimpin oleh Tunggal Ametung

dalam usaha untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar dengan berdirinya Kerajaan Singasari, bagaimana kekerasan dan tindakan represif yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan dahulu dalam upaya menarik pajak dari rakyatnya.

Pada masa kolonial Belanda dan Jepang, tidak bisa dipungkiri pada masa ini Bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa atas perlakuan pemerintahan kolonial, penindasan, pemerasan, pemaksaan, *exploitation de l'homme par l'homme*, eksploitasi manusia oleh manusia dan lain sebagainya. Terlebih lagi ketika diundangkannya Tanam Paksa dan kerja paksa, Rodi dan Romusha, berapa banyak nyawa yang melayang, betapa keji perlakuan mereka dan alangkah bejat moral mereka.

Pada masa awal pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soekarno, kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan yang dilakukan oleh Partai Komunis, yang mengklaim dirinya sebagai partai anti Tuhan dan mempropagandakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat, mengikut kepada pendirinya Karl Marx (1818-1883) dan Frederick Engels (1820-1895) dalam *Communist Manifesto* mereka (1848) (John Lyden, 1995 : 26). Klaim politik ini jelas membahayakan bagi Bangsa Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendapat tantangan keras dari para Ulama dan santri. Pertentangan inilah yang memicu timbulnya kekerasan dan kekejaman antara rival politiknya, hingga terjadi pembantaian massa dan penyembelihan massal yang dilakukan kedua belah pihak.

Kemudian pada masa Orde Baru atau Orde Rezim Soeharto, mungkin ada manfaatnya apabila kita melihat asal muasalnya, Orde Baru aslinya diciptakan oleh Hitler beserta Partai Nazinya yang disebutnya sebagai Orde Baru Eropa yang kemudian di *metaforfosis* oleh Jepang menjadi sebuah ideologi Orde Baru Asia Timur Raya yang fasis. Kemudian apakah Orde Baru Indonesia juga berwatak fasis, ya memang fasis, ekstrem kanan, *Lahir dari kekerasan dan berakhir dalam kekerasan*. Orde Soeharto

menjalankan pemerintahannya dengan dan oleh ancaman, kekerasan, paksaan, pengusuran, teror, fitnah, vonis tanpa proses, pemerjanaan sesuka tafsir penguasa, siksaan, pukulan, hantaman, penyetruman terhadap terdakwa, penculikan, penghilangan, pembunuhan dan lain sebagainya (Mangun Wijaya, 1998 : 55).

Kekerasan pada masa Orde Soeharto ditampilkan dengan kemasam yang indah, semua atas nama negara, pembangunan dan nasionalisme. Rakyat yang tidak mendukung pembangunan, disingkirkan, dibunuh, dihilangkan, diculik dan dicap PKI, di mana pada waktu itu seseorang yang mendapat label PKI atau OT (Organisasi Terlarang) jangan berharap untuk dapat hidup dengan mudah apalagi kalau sudah menyangkut urusan birokrasi pemerintahan, meski dalam pemerintahan yang paling rendah yaitu Pemerintahan Desa.

Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, apabila kita mengikuti informasi media cetak maupun elektronik didukung dengan semakin bebasnya media dalam menyampaikan berita, kita dapat melihat berbagai kekerasan atau kerusuhan di berbagai pelosok Tanah Air Indonesia, apakah itu permasalahan SARA, disintegrasi bangsa, penyerobotan tanah maupun permasalahan pelanggaran hak, tetapi perbedaannya dengan orde-orde sebelumnya adalah bahwa kekerasan-kekerasan dan kerusuhan-kerusuhan tersebut tidak dilakukan oleh penguasa atau atas nama kekuasaan, tetapi lebih dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat.

Usaha Pemetaan Masalah

Kekerasan-kekerasan yang terjadi pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, baik yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) maupun yang bernuansa disintegrasi bangsa tidak bisa dilihat dari sisi lahiriyah saja, tetapi kekerasan-kekerasan tersebut perlu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang melingkupinya, karena naiknya Abdurrahman Wahid sebagai presiden merupakan suatu kompromi nasional yang

tercermin dalam susunan kabinetnya yang berusaha mewedahi aspirasi dari semua kontestan politik yang ikut pemilu, sehingga kabinet tersebut dinamakan kabinet "Persatuan Nasional". Hal ini berimbas kepada munculnya dualisme kepemimpinan dari para menteri kabinetnya, dalam kondisi tertentu kepada parpolnya dan dalam kondisi yang lain kepada Presiden. Dan yang lebih memperparah, naiknya Abdurrahman Wahid mewarisi kondisi 'kiamat' dalam segala bidangnya sebagai warisan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Jendral Soeharto.

Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji kekerasan-kekerasan yang terjadi pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid dari berbagai aspek.

Kajian Sosial-Politis

1. Teori Desa Mengepung Kota

Telah disampaikan di muka bahwa naiknya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia keempat adalah merupakan hasil kompromi nasional. Para pendukung bagi naiknya beliau menjadi presiden dari poros tengah dan Golkar tidak secara tulus mendukungnya, tetapi sekedar "*akhoffu dhararain*". Dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie yang merupakan kandidat presiden dari Partai Golkar dan didukung Poros Tengah, tinggal dua kandidat presiden yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri yang sama-sama mempunyai 'cacat' dalam perspektif poros tengah dan Golkar. Kedua kandidat tersebut sama-sama merupakan pilihan sulit bagi mereka, tetapi akhirnya Gus Dur yang dipilih, karena menurut mereka Gusdur lebih tidak membahayakan dari Mega.

Ketidakpuasan ini yang memicu kedua kelompok tersebut untuk selalu mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden dengan kritik-kritik yang seringkali tidak konstruktif, membangun bangsa dan negara, sehingga yang tampak dipemukaan roda pemerintahan yang dijalankan Presiden tampak

amburadul dan kacau balau, karena yang ada dalam benak kedua kelompok tersebut hanya sisi-sisi negatif Presiden dan atau kebijakannya, padahal tidak sedikit capaian kemajuan-kemajuan yang telah diraihinya, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Munculnya berbagai kerusuhan dan kekerasan di berbagai pelosok Tanah Air barangkali juga merupakan imbas dari ketidakpuasan tersebut, sehingga tidaklah menyimpang jauh apa yang disinyalir Menteri Pertahanan Kabinet Gus Dur, Juwono Soedarsono ketika berbicara pada seminar "*Indonesian Economy Half Full or Half Empty*" yang diselenggarakan oleh Danareksa Research Institute di Jakarta pada Kamis 6 Juli 2000, Beliau mengatakan bahwa ada dugaan kuat kroni mantan Presiden Soeharto berkepentingan dalam menciptakan kekacauan di Tanah Air, setiap pengusutan terhadap perkara korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di masa lampau pada akhirnya akan mengarah kepada mereka (Kompas, 7 Juli 2000). Begitu pula yang dikatakan Jaksa Agung Marzuki Darusman bahwa setiap kali Kejaksaan Agung memeriksa orang-orang dekat mantan Presiden Soeharto, maka eskalasi kerusuhan di daerah juga meningkat.

Berbagai kerusuhan dan kekerasan yang diciptakan di daerah-daerah ini pada akhirnya juga merupakan usaha untuk menggoyang Pemerintahan Pusat di Jakarta dengan teori *desa mengepung kota*. Dengan meningkatnya eskalasi kerusuhan di daerah ini diharapkan oleh para provokatornya akan menyedot perhatian pemerintahan pusat untuk segera menurunkan segenap kekuatannya dan semua perhatiannya ke daerah, sehingga permasalahan utama yang dihadapi Bangsa Indonesia, ekonomi dan supremasi hukum tidak bisa dilaksanakan, sehingga para koruptor kakap bisa berleumpang kangkang kembali dan kondisi Bangsa Indonesia tampak seperti akan kiamat. Hal ini memudahkan bagi para rival politik Gus Dur untuk mengimpeachmentnya dengan menyulap Sidang Tahunan MPR mendatang menjadi Sidang Istimewa. Melihat kondisi ini, maka tidak terlalu aneh kalau Gus Dur

dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah kerusuhan selalu menekankan penyelesaiannya dari dan oleh mereka sendiri, pemerintah hanya sekedar memeberikan fasilitas kepada mereka baik di Maluku maupun di Aceh, karena mereka sendirilah yang tahu dengan sebenarnya akar permasalahan yang memicu terjadinya kerusuhan tersebut.

2. Fundamentalisme Agama

Meningkatnya eskalasi kekerasan pada dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya kekerasan yang "mengatasnamakan agama" kurang lebih dikarenakan pemahaman kaku umat terhadap agama. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa iman harus dipegang teguh secara penuh dan harfiah, tidak mengenal kompromi, keluwesan, reinterpretasi ataupun pengurangan (Gellner, 1994 : 13). Pandangan ini menempatkan *doktrin* sebagai "segala-galanya" dan mengesampingkan aspek ritual dan etika sosial, ini berakibat pada gerakan dan misi yang dibawanya, menjadi formalistis, skripturalis dan fundamentalis yang berpandangan bahwa doktrin perlu ditetapkan secara persis dan sebagai hal yang paripurna.

Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, tidak sedikit kerusuhan dan kekerasan yang kurang lebih berlatar belakang fundamentalisme agama, kasus maluku, konflik antar agama yang terjadi 18 bulan lalu yang telah memakan korban sebanyak kurang lebih 4.000 jiwa, operasi dan penyerbuan sepihak atas tempat lokalisasi, tempat mesum dan diskotik oleh ormas-ormas Islam. Kasus kekerasan dengan *modus operandi* baru adalah peristiwa penyerbuan atas Kampung Hanja, Cibuntiris dan Sindang Jaya Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya pada 21-24 Juni 2000 yang berakibat 30 buah rumah habis terbakar. Penyerbuan ini dilakukan oleh orang-orang bertopeng dengan alasan daerah-daerah tersebut merupakan sumber dan berkembangnya aliran sesat. Penyerbuan ini jelas bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 UUU 1945 dan *Universal Declaration of Human Right* artikel ke-18

tentang kebebasan beragama.

Dalam teori-teori ilmu sosial, menurut Moeslim Abdurrahman (1995 : 298) bahwa agama selain menjadi pemersatu sosial juga dapat menjadi unsur konflik, dua unsur tersebut pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang mempunyai kekuatan sama dalam proses kohesi dan konsensus. Wajah ganda dari suatu agama sebagai identitas kohesi umat seagama pada waktu yang bersamaan akan menghasilkan potensi konflik dengan umat agama lainnya. Sehubungan dengan tesis ini, konflik antar kelompok agama akan menjadi suatu yang rawan, karena apabila kita dapat mengatur konflik tersebut agar tidak mengarah dan tidak terjebak ke dalam persaingan ekonomi, kekuasaan, kepentingan dan lain sebagainya, maka kita dapat memodifikasi dan merekayasa hubungan antar agama dan dengan negara tersebut menjadi hubungan yang mutualistik dan konstruktif.

3. Belum tegaknya Supremasi Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi mengatur tingkahlaku manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Idealnya suatu aturan hukum harus ada terlebih dahulu dari pada perbuatan yang akan diatur, karena fungsi hukum adalah mengatur, tetapi fakta berbicara bahwa aturan hukum sering tertinggal jauh dari perbuatan-perbuatan "melawan hukum". Kondisi ini berakibat perbuatan-perbuatan tersebut tidak bisa dijerat dengan aturan hukum yang datang kemudian, karena prinsip hukum adalah *tidak berlaku surut*. Ini sejalan dengan Firman Allah "*Wa ma kunna mu'adzibiina batta nab'atsa rasula*"

Selanjutnya suatu aturan hukum akan mendapat posisi tinggi, dihormati dan mendapat supremasi di masyarakat dan negara apabila semua aparat pejabat hukum (*law enforcement officer*) bertindak secara konsekuen, netral dan tegas dalam menerapkan hukum, tidak membedakan antara yang "kecil" dan "besar" dan tidak memihak kepada yang lebih menguntungkan. Namun dalam prakteknya hukum

dan para aparat penegaknya di Indonesia masih kelihatan memihak dan memperhatikan status--yang pada pemerintahan sekarang masih diusahakan untuk bersikap netral--. Kondisi inilah yang menyebabkan eskalasi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum memuncak yang pada akhirnya ditumpahkan kepada tindakan-tindakan yang main hakim sendiri.

Suatu Upaya Solusi

1. Kajian Agama

Kajian ini lebih difokuskan kepada Islam karena basis agama penulis adalah Islam dan sangat tidak pantas apabila membahas dari sisi Kristen, misalnya, disamping penulis tidak mempunyai otoritas, juga sama sekali tidak mempunyai kapabilitas untuk mengkaji Agama Kristen yang juga mempunyai sisi-sisi filosofis dan metafisis di dalam ajaran-ajarannya. Kajian agama non-Islam biarlah dikaji oleh mereka yang mempunyai otoritas dan kapabilitas dalam bidang tersebut. Kajian ini lebih ditekankan untuk mengkritisi kekerasan yang mengatasnamakan agama atau agama dijadikan alat *legitimator* untuk melakukan tindak kekerasan, tindakan represif dan pembunuhan bahkan pembantaian terhadap warga non-Islam.

Islam berasal dari akar kata "*salima*" yang dalam kamus Hans Wehr, diantaranya diartikan sebagai "*to be safe and sound, unharmed dan secure*" kemudian mendapat tambahan huruf *alif* di depannya, menjadi *aslama* yang bentuk *masbdamya* adalah *islam* yang diantaranya diartikan sebagai "*to hand over, to turn over, to surrender dan to declare oneself comitted to the will of God*". Dari akar kata "*salima*" tersebut bisa dipahami bahwa umat Islam harus lebih mementingkan kesejahteraan, kedamaian, perlindungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan dari kata "*Aslama*" dapat dipahami bahwa Umat Islam harus lebih mengedepankan penyerahan diri kepada Allah secara sungguh-sungguh, karena seseorang yang telah mengaku dirinya muslim berarti

telah mengakui bahwa semua yang diperbuatnya adalah atas kehendak Allah, "*La haula wa laa quwwata illa billahi al Ahyyi al Adziim*", tidak dengan mengedepankan emosi sesat yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Pengakuan ini akan tidak berarti apabila tidak direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari definisi di atas kita perlu memahami agama tidak hanya pemahaman *vialistis*, yang tampak di permukaan saja, tetapi harus melalui pemahaman dan kontemplasi yang mendalam. Di sini penulis akan mengemukakan metode pemahaman agama yang barangkali perlu kita cermati.

2. Islam Agama Etika

Islam sangat mengedepankan etika, Rasulullah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah "*Kana kbuluqubu al Qur'an*". Di sini bisa dipahami bahwa Qur'an sudah menyatu dalam diri Rasulullah yang terefleksikan dalam kesehariannya. Nash-nash Qur'an terutama yang berkaitan dengan etika secara otomatis membias pada tindak-tanduknya dalam kehidupan bermasyarakat dan ber"negara". Penekanan Rasulullah atas pentingnya menjunjung etika ini tercermin dalam sabdanya "*Innama bu'itstu li utammima makarim al akblaq*". Dalam hadits ini dapat dipahami bahwa misi Rasulullah dalam dakwahnya tidak sekedar untuk memerintahkan umatnya untuk mengedepankan etika, tetapi lebih dari itu berusaha menyempurnakan etika yang sudah tinggi dengan senantiasa membiasakan berakhlak yang mulia dalam kehidupan keseharian dalam ber*muamalah* antara sesama.

Sehingga tidaklah berlebihan apabila seorang pembaharu pemikiran Mesir, Al Tahtawi (1801-1873) mengatakan bahwa untuk mencapai kehidupan yang sejahtera semua masyarakat harus berpegang teguh kepada agama dan budi pekerti yang baik (Nasution, 1996 : 47). Dalam memberikan komentar terhadap faham Ibnu Taimiyah yang membagi ajaran-ajaran Islam dalam dua kategori, *ibadat* dan *Muamalah*,

Muhammad Abdul mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Qur'an maupun hadits mengenai ibadat bersifat tegas, jelas dan terperinci. Sebaliknya ajaran-ajaran (baca : etika) mengenai kehidupan kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan bersifat umum dan jumlahnya hanya sedikit sehingga dapat dan perlu disesuaikan dengan zaman, tempat dan kondisi sosial, "*al Islamu sbalibun fi kulli zaman wa makan*" (Nasution, 1996 : 63-64).

3. Islam Agama Perdamaian

Islam adalah seperti dua sisi mata uang, satu sisi berisi ajaran-ajaran kebenaran sedangkan sisi yang lain mengedepankan wajah Islam yang santun, kasih dan menyejukkan bagi semua umat manusia, termasuk makhluk lainnya yang ada di muka bumi. Kedua sisi ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan menguatkan, apabila salah satu sisinya hilang maka 'uang' itu tidak sempurna, untuk tidak mengatakan tidak ada nilainya sama sekali. Barangkali hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah ini cukup untuk dijadikan referensi, "*Qiila ya Rasulallah Ud'u 'ala al Musyrikiina Qaala : Inni lam Ub'ats La'a'anaan wa Innama Bu'itstu Rabmatan*" (Ada seseorang memohon kepada Rasulullah : "Wahai Rasulullah kecamlah orang-orang musyrik tersebut". Rasulullah menjawab : "Saya tidak diutus sebagai pelaknat, tetapi saya diutus hanya untuk memberi kasih dan sayang").

Islam adalah agama misi, begitu juga agama-agama yang lain, agama yang memerintahkan kepada umatnya untuk mengabarkan ajaran-ajarannya kepada orang lain. Dalam hal ini Islam menetapkan aturan-aturan seperti Firman Allah "*La ikraaha fi ad diin ...*", ayat ini diturunkan karena kebiasaan wanita-Anshar, apabila mereka mempunyai anak, mereka akan meyahudikan anak-anak mereka (sebagaimana kebiasaan wanita-wanita Jahiliyah). Ketika Bani Nadzir (Yahudi) diusir dari perkampungan mereka dimana diantara mereka ada golongan Anshar (Islam), ayah-ayah mereka mengatakan : "Kita tidak akan membiarkan anak-anak kita (untuk memeluk

Agama Yahudi)" (Qardhawi, 1994 : 43)

Sebagai agama misi, dalam mengabarkan ajaran-ajarannya, kita perlu mencontoh metodologi yang digunakan Rasulullah, diantaranya sebagaimana yang diungkapkan dalam Surat Ali Imran : 159 "*Fa bima rabmatin min Allabi linta labum walau kunta fadzdzan ghalidz al qalbi lanfadzdzu min haulik*". Menurut as-Suyuthi (1994 : 71) bahwa sifat kasih sayang dan tidak kasar dan keras hati yang dikedepankan Rasulullah dalam hidup bermasyarakat adalah semata rahmat Allah yang agung. Sedangkan menurut Imam Abdurrahman as-Suyuthi (1993 : 358) maksud ayat ini adalah Allah membersihkan pada diri dan hati Rasulullah sifat keras kepala dan keras hati dan menjadikan Rasulullah sebagai hamba yang karib, pengasih dan penyayang terhadap orang mu'min dan juga terhadap orang musyrik sebagaimana hadits di atas. Pendapat ini juga didukung hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad "*Yaumaidzin lata'lamu yabudu anna fi diinina fusbatun inni ursiltu bibanifiyatin sambatin*" (pada hari itu Orang Yahudi benar-benar mengetahui bahwa agama kami membahas masalah yang komprehensif. Sesungguhnya saya diutus untuk mengabarkan agama yang penuh toleransi). Kalau kita perhatikan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas, betapa Islam mengandung ajaran-ajaran yang sangat humanis, penuh kasih dan sayang terhadap sesama tanpa memperhatikan agama, etnis dan golongan. "*La fadhla li Arabiyyin walaa A'jamiyyin illa bi at-Taqwa*".

DAFTAR PUSTAKA

- A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York, Oxford University Press, cet. Ke-23, 1986
- As-Suyuthi, *Shofwah al-Bayan li Ma'aani al-Qur'an al-Karim Mudzayyilan bi Asbab an-Nuzul*, Kairo, Dar as-Salam
- CD Islamicstudies' Software, *mausu'ab al-Hadits as-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.
- Ernest Gellner, *Menolak Posmodernisme Antara Fundamentalisme Rasional dan Fundamentalisme Religius*, Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina (penterjemah), Bandung, Mizan, 1994
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Ithaca New York, Spoken Language Service Inc., 1976
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta Bulan Bintang, 1996
- Imam Abdurrahman ibn al-Kamal Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir ad-Dur al-Mantsur fi at-Tafsir al-Ma'tsur* (juz.2), Lebanon, Dar el Fikr, 1993
- Karl Marx and Frederick Engels, *Religion is Opium of The People*, dalam *Enduring Issues in Religion*, John Lyden (editor), San Diego, Greenhaven Press Inc., 1995
- Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, cet. Ke-3, 1974
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet. Ke-7, 1996
- Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*, (Terjemah), Bandung, Karisma, 1994
- Y.B. Mangun Wijaya, *Menuju Republik Indonesia Serikat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998